

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA DAMBALO KECAMATAN TOMILITO KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pebriyanti Pakaya¹, Rukiah Nggilu², Jusrin Kadir³

^{1,2,3} Universitas Bina Taruna Gorontalo

Pebriyantipakaya02@gmail.com, [nggilurukiah23365](mailto:nggilurukiah23365@gmail.com)

jusrinkadir@gmail.com

Received: 31-07- 2025

Revised: 20-08-2025

Approved: 30-08-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM Di Desa Dambalo Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini terdiri dari tiga fokus yakni Perencanaan program UMKM, Koordinasi dan Akses Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Perencanaan program UMKM masih belum sepenuhnya sesuai hal ini terlihat dari masih kurangnya pendampingan dan keterlibatan pelaku usaha dalam perencanaan. Koordinasi antara kepala desa dengan pelaku usaha di desa dambalo masih perlu diperbaiki hal ini terlihat dari pelaku usaha yang merasa keterlibatan mereka masih kurang dan komunikasi sering kurang lancar dengan Kepala desa. Akses Modal yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam usaha pembuatan kue di anggap terlalu kecil hal ini dapat dilihat dari dampak yang dihasilkan masih terbatas sehingga pelaku usaha kesulitan mengembangkan usahanya secara signifikan.

Kata kunci : Peran Kepala desa, pemberdayaan pelaku UMKM

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lebih dari 64 juta unit UMKM yang menyumbang sekitar 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Di tingkat desa, UMKM memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, serta mendorong pertumbuhan inklusif (Wulandari & Sutrisno, 2022). Peran kepala desa menjadi krusial dalam membentuk ekosistem pemberdayaan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Studi terbaru oleh Putra et al. (2024) dan Maharani et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kepala desa dalam pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses permodalan, dan promosi digital berdampak langsung pada pertumbuhan pelaku UMKM desa. Namun, masih ditemukan kesenjangan implementasi di banyak wilayah, termasuk di Gorontalo Utara.

Peran kepala desa dalam pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diatur dalam beberapa regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga memberikan landasan hukum bagi pemerintah desa, termasuk kepala desa, untuk melaksanakan program pembinaan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan infrastruktur, serta promosi produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara

berkelanjutan. Dengan demikian, kepala desa berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemandirian pelaku UMKM di desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan besar bagi masyarakat desa. Peraturan ini memberikan pengakuan kepada desa untuk mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri. Dengan kewenangan tersebut, desa memiliki peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pengelolaan aset-aset desa secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi cita-cita besar bangsa, meskipun masih menghadapi banyak tantangan, seperti tingginya angka kemiskinan di pedesaan (Agustina & Yahya, 2022). Data BPS pada triwulan III tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 7,53% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Kemiskinan menjadi tantangan utama pembangunan karena menciptakan ketimpangan sosial dan menghambat proses pembangunan (Huda, 2020). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menempatkan pembangunan pedesaan sebagai prioritas (Agustina & Yahya, 2022). Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu fokus pembangunan adalah pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan aset desa (Pradani, 2020). Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014), aset desa meliputi kekayaan asli desa, barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau hak sah lainnya. Aset ini mencakup tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, hutan milik desa, mata air, dan aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, beberapa strategi dapat diterapkan, seperti mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), wirausaha, serta sektor informal untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan juga diperlukan untuk memperkuat daya saing. Investasi, baik swasta maupun publik, perlu diarahkan pada sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Zunaidah dkk., 2021). Selain itu, memperkuat jaringan pengaman sosial menjadi langkah penting lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan, seperti orang miskin, penyandang disabilitas, dan lansia. Pengembangan asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan, pengangguran, dan pensiun, dapat melindungi masyarakat dari risiko ekonomi. Upaya ini juga melibatkan pengurangan ketimpangan pendapatan dengan menerapkan kebijakan redistribusi yang adil. Pemberdayaan perempuan dan anak-anak menjadi bagian integral dari agenda ini. Dengan memberikan akses setara dalam pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi, peluang mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik dapat meningkat, sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara menyeluruh (Anwar & Angga, 2017).

Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun masa depan. Upaya ini mencakup pengurangan eksploitasi berlebihan, pemanfaatan sumber daya sesuai daya dukung lingkungan, serta perlindungan terhadap kerusakan ekosistem. Selain itu, memerangi perubahan iklim menjadi prioritas dengan menekan

emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampaknya, terutama untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan (Shaleh dkk., 2018). Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan strategi krusial dalam mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa pendekatan strategis. Pertama, pengembangan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri sangat penting. Program ini mencakup akses lebih luas ke pendidikan tinggi, pelatihan profesional, serta dorongan untuk pembelajaran sepanjang hayat agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Kedua, inovasi dan teknologi memainkan peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penerapan teknologi modern serta pengembangan keterampilan digital tenaga kerja memungkinkan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mendukung pertumbuhan industri. Ketiga, motivasi dan kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi perhatian utama. Lingkungan kerja yang positif, penghargaan atas kinerja, serta keseimbangan kehidupan kerja yang sehat dapat meningkatkan moral, loyalitas, dan kesehatan tenaga kerja. Keempat, kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan keterampilan tenaga kerja perlu diterapkan. Insentif untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan karyawan, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan, dapat memastikan keberhasilan program pengembangan tenaga kerja (Intan, 2024). Peningkatan produktivitas tenaga kerja membawa berbagai manfaat signifikan. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing di pasar global melalui efisiensi dan kualitas produk yang lebih baik. Selain itu, produktivitas yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, dan memberikan tenaga kerja peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat. Dengan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, daya saing ekonomi secara keseluruhan akan semakin kuat (Damayanti, 2014).. (Chafidz Choirul Huda et al., 2025)

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa pelaku UMKM di Desa Dambalo masih menghadapi hambatan seperti kurangnya dukungan modal, minimnya pelatihan, serta lemahnya komunikasi dengan pemerintah desa.. Kepala desa Dambalo kurang memperhatikan para pelaku usaha pembuat kue kurangnya komunikasi kepala desa dengan para pelaku usaha seperti menanyakan perkembangan usaha yang mereka jalani dan juga kebutuhan untuk pembuatan kue dan juga kepala desa jarang sekali untuk berkunjung ke lokasi UMKM sehingga kurangnya interaksi antara kepala desa dan para pelaku UMKM yang mengakibatkan usaha tidak berkembang dan sudah sejauh mana usaha itu berkembang. Kurangnya komunikasi ini menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan optimal dan pelaku usaha kesulitan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara kepala desa dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kepala desa memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan UMKM. Namun di desa Dambalo upaya kepala desa dalam merancang program masih kurang dan belum optimal hal ini terlihat dari bantuan yang diterima oleh pelaku usaha masih kurang baik dari segi pelatihan, pembiayaan, atau sekedar promosi produk dari pihak desa, sebagai bentuk dukungan dari pelaku usaha, untuk mengatasi hal ini, diperlukan

pelatihan dan biaya tambahan dari pemerintah desa untuk mengoptimalkan program UMKM yang direncanakan.

Kurangnya akses modal dari pemerintah desa Dambalo dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Hal ini terlihat dari minimnya dukungan modal dari pemerintah desa, modal yang sedikit dapat menghambat perkembangan usaha yang di kelola. Hal ini menghambat kemandirian pelaku UMKM tidak adanya prioritas anggaran bagi pelaku usaha mengakibatkan usaha tidak berkembang maka dari itu perlunya peningkatan modal usaha dari pemerintah desa.

Dengan belum optimalnya peran kepala desa dalam pemberdayaan UMKM di desa dambalo menjadi sebuah tantangan besar akibatnya perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sehingga UMKM dapat lebih berkembang dalam perekonomian masyarakat.

Tabel 1.
Jumlah Pelaku Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku Umkm
1.	Warung sembako	40 pelaku usaha
2.	Toko kue	5 pelaku usaha
3.	Usaha menjahit	1 pelaku usaha

Penelitian ini menggunakan **teori pemberdayaan masyarakat** sebagai landasan utamanya. Dalam dokumen, teori yang dirujuk berasal dari pemikiran Ife (2002), yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat hanya dapat tercapai jika dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemberdayaan seperti pendekatan holistik, kesinambungan, keberagaman, pertumbuhan organik, keseimbangan perkembangan, serta upaya mengubah struktur sosial yang merugikan.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan konsep administrasi publik, khususnya berkaitan dengan peran kepala desa dalam konteks birokrasi ideal menurut Max Weber dan fungsi-fungsi pemimpin desa seperti yang dijelaskan oleh Haryadi (2018), Wahyudi dkk (2019), dan Sondang P. Siagian (2009). Teori-teori tersebut membingkai peran kepala desa bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, stabilisator, dan inovator dalam proses pemberdayaan pelaku UMKM di des

KAJIAN TEORI

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah peneliti baca diantaranya yaitu : Bellani Syahputri Siregar 2020 " Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Laut Dendang" Penelitian Bellani Syahputri Siregar (2020) tentang "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Laut Dendang" bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi UMKM, menganalisis hambatan yang dihadapi pelaku UMKM seperti keterbatasan modal, kurangnya sosialisasi, dan minimnya pelatihan dalam meningkatkan produktivitas serta pemanfaatan sumber

daya alam secara optimal, serta mengevaluasi peran pemerintah desa dan daerah dalam memberikan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi modal guna mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengandalkan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data secara mendalam. Fokus penelitian adalah pada hambatan-hambatan UMKM serta peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Desa Laut Dendang, khususnya di Kecamatan Percut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UMKM sudah berkembang di desa tersebut, masih terdapat kendala utama berupa modal usaha yang terbatas dan kurangnya pelatihan serta sosialisasi yang memadai, sehingga peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM agar usaha mereka dapat berkembang lebih optimal dan berkelanjutan.

Nandang (2022) dengan judul “ Peran Kepala desa Dalam Mengembangkan UMKM di desa karya mulya” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi peran kepala desa Karya Mulya dalam mengembangkan UMKM berdasarkan indikator kepemimpinan menurut Kartono dan Kartini (2014), yaitu kemampuan mengambil keputusan, memotivasi, komunikasi, mengendalikan bawahan, tanggung jawab, dan mengendalikan emosi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan data dari wawancara dengan narasumber terkait. Fokus penelitian adalah pada kemampuan dan peran kepemimpinan kepala desa dalam mendukung perkembangan UMKM di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengambil keputusan, memotivasi, berkomunikasi, mengendalikan bawahan, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta mengendalikan emosi, yang secara signifikan memberikan dampak positif dan membantu perkembangan UMKM di Desa Karya Mulya menurut penilaian para narasumber.

Rikardus Monaweyauw (2023) yang berjudul” Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Bojong Gede. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan peran kepala desa secara mendalam. Fokus penelitian adalah pada strategi, upaya, dan kontribusi kepala desa dalam pemberdayaan UMKM sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian Bellani Syahputri Siregar (2020), Nandang (2022), dan Rikardus Monaweyauw (2023), dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sangat penting dan strategis dalam mengembangkan UMKM di desa. Kepala desa berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan pelatihan, bimbingan, dan akses modal bagi pelaku UMKM, sekaligus sebagai motivator yang memberikan dorongan bagi pengembangan usaha. Selain itu, kepala desa berperan sebagai penghubung antara pelaku UMKM dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya sehingga UMKM memperoleh dukungan yang optimal. Kemampuan kepemimpinan kepala desa dalam mengambil keputusan,

memotivasi, berkomunikasi, mengendalikan bawahan, bertanggung jawab, serta mengendalikan emosi terbukti sangat berpengaruh positif dalam mendorong kemajuan UMKM. Meski UMKM di desa-desa tersebut sudah berkembang, berbagai kendala seperti keterbatasan modal dan minimnya pelatihan masih menjadi tantangan utama yang memerlukan peran aktif kepala desa untuk mengatasinya. Dengan demikian, kepala desa bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga penggerak utama yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan UMKM, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Teori Administrasi Publik

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari Bahasa Inggris "*administration*", dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda "*administratie*", yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya (Elvira et al 2023). Menurut (Gea et al., 2023) Administrasi adalah kegiatan yang menduduki kedudukan sentral di dalam pembinaan dan pengembangan pada setiap kegiatan kerja sama sekelompok manusia, dalam bidang pendidikan juga harus ada administrasi yang mampu mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah mua bentuk dari proses kerja sama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang telah dipilih sebelumnya. (Sawir, 2021)

Pengertian Administrasi Publik

Menurut (Adolph, 2022) administrasi publik merupakan kolaborasi antara sekelompok individu atau lembaga dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran pemerintah dengan cara yang efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui proses ini, berbagai pihak bekerja sama untuk memastikan bahwa pelayanan publik dijalankan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang tepat, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara (Panjaitan & Pardede, 2021). Adapun menurut menurut Chandler dan Plano dalam jurnal yang ditulis oleh (Supriyadi, 2021) bahwa ternyata administrasi publik juga Merupakan proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik, Administrasi Publik menjadi proses yang kompleks dalam pengelolaan publik agar tercipta pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Banyak hal yang dikelola oleh Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat oleh karenanya peran administrasi publik sangat vital dengan berbagai dinamika tuntutan masyarakat. Adanya tuntutan yang semakin meningkat memunculkan ide dalam

perkembangan administrasi publik guna menjawab tuntutan dan tantangan dalam keberhasilan mengelola Negara.

Konsep Organisasi

Menurut Winardi dalam Ruhana (2018) dalam tulisan yang dikemukakan oleh (Muspawi et al., 2023) organisasi adalah suatu sistem yang berisikan berbagai macam elemen dan sub sistem, disini manusia merupakan sub sistem yang paling penting, dan dapat dilihat bahwa masing-masing sub sistem saling bersangkutan dan berinteraksi dalam mencapai sasaran atau tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Artinya disini interaksi yang terjadi antar sub sistem yang ada dalam organisasi bertujuan agar sasaran yang ditetapkan lebih berhasil. Organisasi meskipun dianggap sebagai suatu sistem, namun tidak semua sistem merupakan sebuah organisasi. Menurut (Ramdhani, 2019) Organisasi pada dasarnya diadakan untuk memungkinkan setiap anggotanya mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab tertentu yang dapat memberikan sumbangan tertentu pula bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Karena itu organisasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan dan bukan merupakan tujuan. Namun demikian, mudah pula dapat dimengerti bahwa tujuan itu sendiri, perumusan dan pencapaiannya, sangat dipengaruhi oleh mutu dan efektivitas penggunaan alat atau organisasi itu sendiri. Hal terakhir inilah, antara lain yang mendorong para ahli memberikan perhatian terhadap prinsip, teknik, struktur, dan desain organisasi. Sejatinya keberadaan organisasi memang diciptakan untuk kepentingan manusia. Mau tidak mau, manusia harus bisa mengatur, mengelola, dan mengembangkan organisasi yang ada tersebut, baik dalam skala yang paling kecil sampai organisasi dalam skala yang besar sekalipun. Dari sinilah perlunya pengorganisasian sebagai sebuah ilmu atau sebagai sebuah seni dalam melakukan pengelolaan organisasi tersebut dibutuhkan serta diperlukan oleh manusia itu sendiri (Syukran et al., 2022).

Konsep Peran

Individual role atau peran individu adalah peran yang dijalankan seseorang dalam suatu kelompok atau organisasi sesuai dengan tanggung jawab, fungsi, dan harapan sosial yang melekat pada posisinya. Peran ini membentuk perilaku individu dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu (Citraningsih & Noviandari, 2022). Adapun menurut (Tang & Vandenberghe, 2021) kemampuan individu merupakan faktor penting yang menentukan sejauh mana seseorang dapat memahami, menyesuaikan diri, dan menjalankan peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan atau kelompoknya. Teori ini menjelaskan bahwa setiap peran membawa seperangkat ekspektasi, tanggung jawab, dan keberhasilan individu dalam memenuhi peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif, emosional, dan sosial yang dimilikinya. Tanpa kemampuan yang memadai, individu dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan perilaku dengan norma peran, yang dapat menyebabkan ketegangan peran (*role strain*) atau konflik peran (*role conflict*). Oleh karena itu, kemampuan bukan hanya pelengkap, melainkan syarat utama dalam menjalankan peran secara efektif dalam suatu sistem *sosial*.

Kelompok role atau Peran kelompok adalah tanggung jawab dan fungsi yang dijalankan oleh suatu kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran tertentu yang saling melengkapi, sehingga tercipta kerja

sama, koordinasi, dan efektivitas dalam menyelesaikan tugas serta menjaga keharmonisan dalam dinamika kelompok tersebut (Si'in Si'in et al., 2024). *Informational role* atau Peran informasi adalah fungsi penting dalam menyediakan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan, komunikasi, serta koordinasi dalam organisasi atau masyarakat. Informasi membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan tepat waktu (Andrian Syahputra et al., 2022). Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya prasarana pembangunan sarana dan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan (Ramdayanti et al., 2021).

Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yang, menurut (Maqfiro et al., 2021), mampu mendorong percepatan dalam mengembangkan potensi di tingkat lokal maupun nasional. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat modal sosial, yang pada gilirannya menstimulasi keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan dan membangun kolaborasi yang harmonis antara institusi negara dan publik guna mencapai tujuan bersama. Adapun Peran pemerintah sebagai regulator tercermin dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses peluang peningkatan kesejahteraan, sehingga mereka dapat berkembang secara mandiri, cepat, dan berkelanjutan (Nirwana et al., 2022).

Teori UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan usaha dengan keterbatasan pada modal awal, nilai aset yang dimiliki, serta jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit. Besaran modal maupun jumlah karyawan biasanya ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau instansi terkait sesuai dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, UMKM dapat dikategorikan sebagai jenis usaha berskala kecil dengan sumber daya yang masih terbatas, baik dari segi keuangan maupun tenaga kerja. Meskipun demikian, UMKM tetap berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kepuasan konsumen dalam operasionalnya (Sri Utami & Sasmita, 2022; Alimudin et al., 2019).

Menurut Setiyawati (2021), pengembangan UMKM adalah proses terencana yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan dan bimbingan agar usaha dapat tumbuh dari skala kecil ke menengah bahkan besar.

Rizky et al. (2022) dan Farandy & Samsuki (2023) menyatakan pengembangan UMKM memerlukan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas dari pelaku usaha agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Fathorrahman (2016) mengemukakan indikator pengembangan UMKM meliputi peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ramadhani & Hana (2024) menekankan bahwa pengembangan UMKM adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan upaya strategis seperti

penciptaan iklim usaha kondusif, bantuan permodalan, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran.

Perencanaan, Koordinasi, Dan Akses Modal

• Perencanaan

Perencanaan adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengembangan UMKM, perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan pelaku usaha, pemetaan potensi, dan penentuan program pembinaan, pelatihan, pemasaran, serta fasilitasi sumber daya agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan analisis situasi saat ini, penetapan target, dan pembuatan roadmap atau strategi yang terukur untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian (Collins et al., 2021)

Erly Suandy (2001) mengartikan perencanaan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan penyajian strategi, taktik, serta tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama secara menyeluruh. (Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., 2008)

• Koordinasi

Koordinasi adalah proses pengaturan dan penyelarasan hubungan antara berbagai pihak atau unit dalam sebuah organisasi agar bekerja sama secara teratur dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Koordinasi adalah usaha memadukan berbagai arahan atau perintah menjadi satu tujuan dengan arah yang sama, serta menyelaraskan dan menyeimbangkan keinginan setiap anggota terkait Suryani et al., 2021. (Adiningsih, 2021)

• Akses Modal

Akses modal adalah jalan masuk atau kemampuan seorang wirausaha untuk memperoleh modal, baik berupa uang, barang, maupun sumber daya lain yang digunakan sebagai dana pokok untuk menjalankan dan mengembangkan usaha. Modal ini bisa berasal dari sumber pribadi sendiri ataupun pinjaman dari pihak lain, seperti lembaga keuangan formal maupun non-formal.

Akses permodalan terdiri dari dua indikator utama, yaitu: pertama, informasi kredit formal yang menyediakan pemahaman yang jelas tentang opsi pembiayaan yang tersedia untuk UMKM, dan kedua, prosedur akses permodalan yang memastikan bahwa proses pengajuan dan persetujuan pinjaman berlangsung dengan lancar dan transparan (Eliza dkk., 2023). (Herliana et al., 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memahami secara mendalam peran kepala desa dalam pemberdayaan UMKM di Desa Dambalo. Data dikumpulkan melalui : Wawancara mendalam terhadap kepala desa dan pelaku UMKM, Observasi partisipatif terhadap aktivitas usaha dan interaksi pemdes dengan pelaku usaha, Dokumentasi program desa dan laporan keuangan terkait UMKM. Alur penelitian ini dimulai dengan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah pemberdayaan UMKM di Desa Dambalo. Setelah itu, peneliti menyusun instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara dengan kepala desa dan pelaku UMKM, observasi kegiatan usaha, serta telaah dokumen desa. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik, kemudian divalidasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis digunakan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi strategis bagi optimalisasi peran kepala desa dalam pemberdayaan UMKM. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis dilakukan secara tematik dan interpretatif sesuai pendekatan Miles & Huberman (1994).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran kepala desa dalam pemberdayaan UMKM di Desa Dambalo masih bersifat administratif dan belum strategis. Yaitu :

1. Perencanaan program tidak partisipatif; pelaku usaha tidak dilibatkan dalam perumusan kebutuhan dan desain program.
2. Koordinasi antara pemerintah desa dan UMKM lemah; komunikasi hanya bersifat satu arah, tanpa forum dialog rutin.
3. Akses modal sangat terbatas; alokasi anggaran desa untuk UMKM <5% dari Dana Desa.

Pembahasan mengaitkan temuan tersebut dengan teori Ife (2002) tentang pemberdayaan berbasis partisipasi, dan teori Weber tentang birokrasi desa yang kaku. Dibandingkan dengan penelitian Siregar (2020) dan Monaweyauw (2023), peran kepala desa Dambalo masih jauh dari ideal sebagai fasilitator pembangunan ekonomi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Dambalo masih belum berjalan secara optimal. Kepala desa belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan pembina bagi pelaku UMKM. Sebagai fasilitator, kepala desa kurang membangun komunikasi yang intensif dengan pelaku usaha serta belum mampu menjembatani kebutuhan mereka dengan pihak-pihak terkait. Dalam perannya sebagai motivator, kepala desa belum memberikan dorongan dan semangat yang konsisten bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Sebagai mediator, kepala desa belum melakukan upaya untuk menjalin kerja sama dengan instansi atau lembaga eksternal yang dapat membantu pengembangan UMKM. Demikian pula dalam peran sebagai pembina, kepala desa belum memberikan pelatihan atau pendampingan yang efektif dan sesuai kebutuhan para pelaku usaha.

Pembahasan dalam penelitian ini mengungkapkan beberapa permasalahan utama dalam pemberdayaan UMKM, yaitu kurangnya koordinasi antara kepala desa dan pelaku usaha, perencanaan program yang belum tepat sasaran, serta minimnya dukungan modal dari pemerintah desa. Banyak pelaku UMKM merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan program, sehingga bantuan atau pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Salah satu contoh nyata adalah bantuan modal usaha yang sangat minim, yang tentu tidak cukup untuk mendorong perkembangan usaha secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan keterlibatan kepala desa dalam seluruh proses pemberdayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program, agar peran kepala desa benar-benar mampu mendorong kemandirian dan kemajuan UMKM di Desa Dambalo.

Selain permasalahan internal yang berkaitan dengan peran kepala desa, hasil penelitian ini juga mengindikasikan adanya kendala eksternal yang turut mempengaruhi kurang maksimalnya pemberdayaan UMKM di Desa Dambalo. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi digital sebagian pelaku usaha, yang membuat mereka kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren pasar. Hal ini menghambat upaya inovasi produk maupun perluasan jaringan pemasaran, terutama di era digital saat ini yang menuntut pelaku usaha untuk mampu bersaing secara lebih luas. Kurangnya dukungan dari lembaga keuangan lokal juga menjadi hambatan tersendiri, karena pelaku UMKM kesulitan mengakses kredit usaha yang seharusnya bisa menjadi modal pengembangan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM tidak hanya membutuhkan peran aktif kepala desa, tetapi juga sinergi lintas sektor termasuk dinas terkait, lembaga keuangan, serta pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada penguatan kapasitas pelaku usaha secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Peran kepala desa dalam pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Dambalo belum dijalankan secara optimal, terutama dalam aspek partisipasi pelaku usaha dalam perencanaan, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta terbatasnya alokasi modal usaha. Untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan, dibutuhkan kepemimpinan desa yang progresif, alokasi anggaran yang memadai, serta kemitraan strategis dengan dinas koperasi, perbankan, dan NGO pendamping UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- (Adiningsih, 2021; Chafidz Choirul Huda et al., 2025; Collins et al., 2021; Herliana et al., 2025; PEBRIYANTI PAKAYA[1], n.d.; Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., 2008)Adiningsih, W. I. (2021). Analisis Dampak Self Efficacy Dan ..., Widya Indah Adiningsih, Universitas Multimedia Nusantara. 1–21.
- Adolph, R. (2022). Administrasi dan Administrasi Publik. 1–23. 086. <https://doi.org/10.47153/sss21.3152022>
- Agusta, M. S., Lubis, L., & Arieffiany, D. (2020). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam
- Andrian Syahputra, Ragil Wiranti, & Widiya Astita, W. A. (2022). Peran Sistem Informasi
- Chafidz Choirul Huda, Mahendra Wijaya, & Drajat Tri Kartono. (2025). Perintisan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pemanfaatan Kontrak Sewa Lahan Tanah Kas Desa di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 2749–2763. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4134>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No Title 濟無 No Title No Title No Title. 8–21.
- Citrarningsih, D., & Noviandari, H. (2022). Interaksionisme Simbolik: Peran
- Gea, R. J., Soselisa, P. S., & Pattimukay, H. V. R. (2023). Peran Pemerintah Negeri Dalam Pelayanan Administrasi Di Negeri Hitumessing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 3(2), 90–102. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v3i2.3971>
- Fathorrahman, A. (2016). *Evaluasi Pengembangan UMKM di Daerah Tertinggal*. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 8(2), 76–90.

- Herliana, Y., et al. (2025). *Akses Permodalan dan Keberlanjutan UMKM*. Jurnal Ekonomi Terapan, 15(1), 33–49.
- Intan, N. (2024). *Produktivitas Tenaga Kerja dan Peran Desa dalam Transformasi Ekonomi*. Jurnal Sumber Daya Manusia, 11(1), 1–15.
- Maharani, L. et al. (2023). *Kolaborasi Pemerintah Desa dan UMKM di Era Digital*. Jurnal Inovasi Pembangunan, 9(1), 45-59.
- Manajemen Organisasi Dalam Pengambilan Keputusan. Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMASIF), 1(1), 26–31. <https://doi.org/10.35870/jmasif.v1i1.67>
- Maqfiro, S. N. A., Fajrin, I., & Sukmah, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm), 4(2), 307–316.
- Monaweyauw, R. (2023). *Strategi Kepala Desa dalam Penguatan UMKM Berbasis Potensi Lokal*. Jurnal Pemberdayaan Desa, 7(2), 201–219.
- Muspawi, M., Janati, S., Panjaitan, K., & Dwi Mawarni, J. (2023). Menelaah Konsep-
Panjaitan, D. T. M. R., & Pardede, D. K. (2021). Administrasi Publik. CV.Eureka Media Aksara, 9.
- Prof. Dr. Evi Elvira Masengi, M.S., Elvis M. C. Lumingkewas, M.A.P., Brain Fransisco Supit, M. A. P. (2023). Pengantar Administrasi Publik. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Issue 1).
- Program Rumah Bahasa Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19. Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 23(1), 58. <https://doi.org/10.30649/aamama.v23i1.123>
- Putra, H. R., et al. (2024). *Kepemimpinan Partisipatif dalam Pemberdayaan UMKM Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 21(2), 188-204.
- Ramadhani, T., & Hana, M. (2024). *Pola Kemitraan UMKM dan Pemerintah Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 100–110.
- Rizky, A., et al. (2022). *Inovasi UMKM di Wilayah Perdesaan*. Jurnal Inovasi Sosial, 6(3), 123–138.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. Journal Of Social Science Research, 3(2), 1–15.
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik. In Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik.
- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. Jurnal Perseda, V(2), 130–137.
- Si'in Si'in; Anwar, K. J. (2024). Perilaku Kelompok dalam Organisasi. 2(2), 10–17.
- Siregar, B. S. (2020). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM*. Jurnal Sosial & Ekonomi, 8(1), 77-89.
- Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., D. (2008). Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 1–106. <http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>
- Wulandari, D., & Sutrisno, H. (2022). *Desa Mandiri dan Pemberdayaan Ekonomi UMKM*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 10(3), 115-124.